



## KESEJAHTERAAN DALAM PERPEKTIF ISLAM: ANALISA EKONOMI KERAKYATAN

Oleh: Noviandy

(Dosen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa)

### *Abstract*

*This article tends to perform a critical construction in building the welfare of populist economic. The economic analysis of society used a perspective that was created by Adi Sasono. According to Adi Sasono, the sustainability of populist economics of Indonesia today are often crushed by actopus capitalization. Therefore, this sustainability should be returned to the people according to sunnatullah, not only to restore to the populist economic, but also for social, and for society culture of Indonesia.*

**Keyword:** *Welfare, Economic, Populist*

### **Pendahuluan**

*Apa itu kesejahteraan..?* Mungkin ini pertanyaan yang tepat, yang harus kami jawab terlebih dahulu. Sebelum lebih jauh membahas tentang kesejahteraan dalam sebuah Negara khususnya dalam perspektif Islam. Jika kita merujuk pada Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pengertian Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Undang-undang Republic Indonesia No 11 tahun 2009: 2). Tidak berbeda dengan pakar dan dosen Kesejahteraan Sosial, Edi Soeharto, Ph,D menurutnya kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya. Selanjutnya sebagai pelayanan social, pelayanan sosial mencakup lima bentuk, yakni jaminan social (social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (personal social services) (Edi Suharto, 2006).

Berangkat dari pengertian diatas kesejahteraan haruslah dicapai dengan serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Rakyat secara umum membutuhkan kesejahteraan dalam arti luas, artinya tidak hanya pendidikan yang layak, namun juga layanan kesehatan berkualitas serta mudah diakses, tidak hanya kebutuhan pembangunan fisik tetapi juga pembangunan kebutuhan social lainnya.

Peran besar dalam membangun kesejahteraan rakyat, selayaknya diperankan oleh Negara selaku pemegang amanah rakyat. Karena itu Negara bertanggung jawab terhadap kemiskinan, ketidakadilan, keserakahan para pengusaha, bahkan kebodohan yang berlangsung ditengah masyarakat. Dalam sejarah bangsa, rakyat kecil yang mendukung perjuangan kemerdekaan melawan penjajah. Dalam masa krisis sector ekonomi rakyat mempertahankan kelangsungan hidup Negara karena kemampuannya menyerap kesempatan kerja dan meredam ketegangan social.

Dalam pandangan kami perekonomian rakyat menjadi salah satu pilar dalam mengangkat harkat dan martabat bangsa, artinya kemandirian ekonomi akan berdampak pada banyak aspek; hubungan social yang penuh nilai-nilai luhur akan terejawantahkan dalam setiap sendi kehidupan, nasionalisme kebangsaan akan tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan bangsa-bangsa. Namun perekonomian rakyat tidaklah mampu berdiri dengfan sendirinya jika tidak disokong oleh pilar-pilar lain, terutama perpolitikan yang memihak pada kebutuhan rakyatnya

Ekonomi rakyat yang maju akan membuat lingkungan sosial menjadi lebih bersahabat untuk dunia usaha dan memperluas basis masyarakat konsumen yang berdaya beli tinggi. Karena itulah menurut Adi Sasono koreksi ketidakadilan harus digerakan tidak untuk menghancurkan perusahaan besar. Paham ekonomi rakyat tidak anti yang besar, yang dipersoalkan adalah kecendrungan monopoli yang menciptakan ekonomi biaya tinggi dan beban bagi rakyat konsumen, karena ketiadaan kompetisi di dalam proses ekonomi rakyat ditujukan untuk mengatasi ketidakadilan dan kemiskinan masal yang menjadi sumber ketegangan sosial selama ini. Perjuangan membangun ekonomi rakyat diarahkan agar terbentuk kelas menengah sebagai mayoritas masyarakat bangsa yang mendukung pembangunan sejati yang berkelanjutan dan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang demokratis (Sritua Arief & Adi Sasono, <http://partaimerdeka.or.id/artikel/artikel-terpilih/52-akar-keterpurukan-indonesia.html>).

Prinsip keadilan, adalah kata kunci Adi Sasono dalam menjalani sebagai seorang menteri. Dia mengharapakan, prinsip keadilan merupakan 'roh' yang harus mewarnai perjalanan hidup bangsa menuju Indonesia Baru. Ia berkeyakinan, konsep Negara; dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tak akan pernah sirna.

Dalam makalah ini, penulis mencoba menggambarkan kesejahteraan yang harus dipenuhi oleh Negara dalam perspektif Islam dengan mengkaji pemikiran Adi Sasono dengan topik Ekonomi Kerakyatannya.

## Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan merupakan lawan dari perekonomian Kolonial-kapital yang dibangun oleh VOC belanda selama 350 tahun, yang hasilnya menanamkan kemiskinan negeri. Ekonomi kerakyatan adalah basis untuk mengembangkan perekonomian Indonesia. Basis perekonomian Indonesia adalah rakyat yang terdiri dari petani, pedagang kecil dan menengah serta buruh. Potensinya adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sedangkan tujuan Ekonomi Kerakyatan: Seluruh Rakyat dapat produktif dan memiliki kemampuan mengembangkan potensinya sehingga dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan ketidakadilan, serta ketergantungan bangsa terhadap pihak asing. Perwujudan nyata Ekonomi Kerakyatan akan mempersiapkan dan menerapkan kondisi pembangunan yang sejak awal turut menyertakan rakyat, mulai dari pembangunan skala lokal sampai nasional.

Jika kita merujuk pada sila ke empat pancasila, istilah kerakyatan dapat dipastikan mengandung arti demokrasi. Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang demokratis atau demokrasi ekonomi. Penjelasan lebih lanjut dapat kita lihat dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945, dalam pasal tersebut tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang didahulukan, bukan kemakmuran orang perseorangan (Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33).

Berdasarkan penggalan kalimat ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi dapat dipahami dengan mudah. Ekonomi kerakyatan adalah suatu situasi perekonomian di mana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, hasil-hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat, sementara penyelenggara kegiatan-kegiatan ekonomi itu pun berada dibawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat (Revrison Baswir, 1997: 4).

Ekonomi kerakyatan tidak beorientasi pada tujuan, namun lebih kepada cara masyarakat mengatur system ekonominya, karena itu cara-cara mengatur system ekonomi haruslah lebih mementingkan kemakmuran rakyat dengan semangat kekeluargaan (Mubyarto, 1997). Ini mungkin yang di maksud dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berbeda dengan kondisi yang terjadi di negeri ini yang menganut ekonomi kapitalis, yang menyebabkan kekayaan terpusat pada segelintir orang atau negara, dan menyebabkan semakin besarnya gap/ketimpangan antara kaya dan miskin, membuat banyak orang kemudian berfikir untuk terus mencari alternatif sistem ekonomi.

Saat ini, berjuta-juta orang menganggur, puluhan juta orang berada dibawah garis kemiskinan, sektor moneter yang semakin jauh dari sektor riil sehingga berpotensi meledakkan *boom* yang sudah terbentuk, dan berbagai macam masalah melingkupi kehidupan perekonomian kita. Ini pula yang menyebabkan bangsa ini kembali berfikir untuk mencari alternatif sistem ekonomi yang lebih dapat mensejahterakan rakyat.

Ekonomi kerakyatan, sebagai khazanah asli pemikiran ekonom kita juga mulai diperbincangkan orang.

Kesenjangan besar yang terjadi antara ekonomi kapitalis dan ekonomi kerakyatan dapat kami analogikan bagai perumpamaan living sunnah pada shalawat; perumpamaannya bagai kita mengisi air dalam gelas yang terus menerus hingga airnya penuh dan melimpah keluar gelas, air yang melimpah tersebutlah syafaat yang akan kita dapatkan dalam setiap shalawat yang akan lantunkan. Perumpamaan pemerataan pendapatan inilah yang sebenarnya menjadi kendala besar bagi ekonomi kapitalis. Mereka berpendapat bahwa kemakmuran kaum pemegang modal akan melimpah kedaerah disekitarnya. Namun mereka lupa, bahwa manusia yang bebas nilai tidak akan cukup dengan harta sebanyak apapun. Timbullah ketimpangan ekonomi, ketidakmerataan pendapatan yang semakin hari semakin besar.

Menurut hemat kami Ekonomi kerakyatan memiliki kesamaan tujuan dengan ekonomi Islam. Ada nilai moral yaitu Qanaah, menghindari mubadzir, tidak serakah, tidak bersifat konsumtif. Ada instrumen pemerataan seperti zakat, infaq shadaqah. Ada peran pemerintah dalam menjaga kemaslahatan orang banyak.

Menurut analisa kami peran pemerintah selama ini tidak membangun ekomi kerakyatan secara mengakar pada lapisan masyarakat yang paling bawah. Kelembagaan ekonomi kerakyatan selayaknya bersendikan asas hidup dan tradisi masyarakat setempat-bukan kembangkan berdasarkan pandangan atau filsafat hidup yang berasal dari luar masyarakat setempat, yang selama ini kit abaca di media-media dengan program “warungisasi” (setiap kelompok sasaran atau warga binaan dilatih atau diberi modal agar dapat membuka warung) atau “kambingisasi” (pemberian kambing kepada kelompok miskin untuk dikelola secara kelompok). Sedangkan system sosial masyarakatnya mencakup beberapa hal yang lebih luas yang meliputi pembangunan sosial, kebijakan sosial, relasi kekuasaan, ketidakadilan gender, eksklusifisme, pembelaan hak-hak public, dan kesetaraan sosial yang kurang mendapat perhatian

Alhasil program yang tidak mengakar dengan nilai dan filosofis masyarakat setempat dan tanpa perspektif holistic yang memadukan kegiatan-kegiatan local dengan analisis kelembagaan dan kebijakan sosial secara integrasi, pendekatan pemberdayaan masyarakat bukan saja akan kurang efektif, melainkan pula tidak akan berkelanjutan. Lebih lagi jika “*ikan dan pancing*” yang kita analogikan bantuan pemeritah, meskipun kelompok sasaran diberi ikan dan pancing sekaligus, mereka tidak akan berdaya jika seandainya kolam dan sungai di sekitar mereka telah dikuasai oleh elit atau kelompok kuat tertentu. Oleh karenanya gerakan membangun dan memberdayakan masyarakat memerlukan pendekatan holistic yang mempertimbangkan isu-isu local dan global.

Pada satu sisi rakyat diberikan kebebasan dalam berekpresi dalam menentukan masa depannya dengan tetap menjunjung tinggi kebebasan atau tidak merugikan orang lain, disisi lain Negara juga berkewajiban memberikan informasi dan pertimbangan baik secara ekonomi maupun social politik. Hal ini disampaikan dalam Konvenan Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 11. Tahun 2005 tentang

Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Allah berfirman dalam surat Al-Hasyar, ayat 7, yang menjelaskan dengan tegas tentang pemberdayaan Ekonomi rakyat dengan bentuk kecaman agar perputaran uang tidak tidak hanya berlangsung dalam lingkaran orang kaya saja, yang kemudian kita sebut dengan ekonomi kerakyatan:

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب

*Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Qs. Al-Hasyr, A: 7)*

Ayat diatas juga menugaskan kepada Negara untuk mengatur keuangan dalam memberdayakan rakyatnya dengan penuh amanah, harta rampasan perang dapat kita terjemahkan dalam konteks kekinian adalah pajak dari seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelola oleh Negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan rakyat yang dimaksud juga tidak dibenarkan oleh Allah jika hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja. Kami melihat apa yang difirmankan Allah dalam surat al-hasyr ayat 7 tersebut merupakan landasan yang sangat urgen dalam membangun system ekonomi kerakyatan.

Dalam pandangan Adi Sasono hasil yang tak kalah bahayanya dari system kapitalis saat ini adalah meningkat drastisnya urbanisasi (perpindahan penduduk dari desa ke Kota), masyarakat secara desa tidak mampu lagi melihat potensi besar yang terdapat di desa yang potensi tersebut tidak terdapat di kota tempat tujuan mereka (Adi Sasono, 1987: 14).

Sungguh disayangkan masyarakat tidak lagi mau bertani, karena tidak memiliki hasil yang cukup untuk hidup mereka. Mereka tidak mau lagi mengembangkan usaha kecil, karena dipastikan ketentuan harga selalu dikalahkan oleh pasar yang dimonopoli oleh para pengusaha—bukti-bukti ini mengharuskan mereka lebih baik jadi buruh dengan urbanisasi ke kota walaupun dengan upah buruh yang cenderung kecil. Diperparah lagi dengan rusaknya hubungan social dan kultural mereka ditengah masyarakat. Dalam jangka waktu 5 tahun terakhir telah meningkatkan urbanisasi yang belum ada taranya di Negara-negara berkembang, dengan akibat pesatnya perluasan kota-kota hingga beberapa kali lipat pada setiap 10-15 tahun (Adi Sasono, 1987: 15).

Berbicara tentang upah buruh yang cenderung rendah, kami menilai hal ini merupakan bagian dari perencanaan besar dari ekonomi kapitalis—ketika hasil

pertanian dibeli dengan harga murah karena pemerintah ditekan dengan hutang luar negeri, seketika itu pula, jika kaum tani harus keluar dari ladangnya sendiri dan membeli hasil pertanian dari luar negeri dengan harga mahal. Hal ini bukan perumpamaan, namun sudah terjadi berulang kali di Indonesia, kita pernah harus mengimpor; kacang hijau, beras, gula dari Thailand. Hal ini hanya menjadi bahan introspeksi sesaat ketika lapar. Alhasil kaum tani harus menjadi buruh bahkan diladangnya sendiri dengan upah rendah. Lagi-lagi pemerintah tidak mampu mengangkat harkat dan martabat buruh sesuai dengan Konvenan Ekonomi & Sosial Budaya yang diratifikasi oleh Pemerintah dengan Undang-Undang No 11 tahun 2005 (Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)).

Menerapkan ekonomi kerakyatan tidaklah semudah yang kita bayangkan, hutang luar negeri yang semakin tahun semakin bertambah sangat berdampak dalam penerapan ekonomi kerakyatan—Indonesia bagai di dikte untuk terus membangun hubungan kerjasama dengan Negara-negara lain terutama Negara pemberi hutang. Gerakan ekonomi kerakyatan belum saatnya mampu keluar dari gerakan ekonomi kapitalis yang telah menggurita lama dalam system Negara dan masyarakat Indonesia.

Secara tersurat membangun hubungan bisnis luar negeri akan memberikan dampak positif dimana perjanjian perdagangan akan menguntungkan kedua belah pihak. Setiap pihak yang memproduksi produk dapat dipastikan keuntungan dari produk tersebut—begitu pula sebaliknya produk yang kita beli dipastikan pula dengan harga yang tidak mahal karena dibebaskan dari pajak sesuai dengan perjanjian kerjasama. Pertanyaannya apakah Indonesia sudah saatnya membangun kerjasama luar negeri dalam bentuk perdagangan? Bukankah Negara ini hanya mampu memproduksi bahan mentah dan tenaga kerja murah saja? Bukankah kerjasama dengan luar negeri hanya akan melemahkan posisi Indonesia dan selalu berada dalam posisi yang selalu dijajah?

Kita sangat berharap ekonomi Kerakyatan sebagai kebijakan pembangunan Indonesia bukan hanya pelengkap, dapat menjadi sebuah bangsa yang berdaulat dan merdeka (Adi Sasono, <http://partaimerdeka.or.id>). Karena perkonomian ini telah diterapkan Di negara-negara berkembang, bahkan negara maju sistem ini diandalkan dalam perekonomian nasional. Selain itu Ekonomi Kerakyatan akan menjadi penyeimbang Globalisasi berdasar “Persaingan Bebas” yang hanya akan memperbesar si Kuat dan menggilas si Lemah (yaitu Rakyat). Satu hal penting yang tidak perlu ditakuti system ini akan tidak memusuhi Pengusaha Besar. Pengusaha Besar adalah bagian dari kekuatan nasional. Yang Kita bangun adalah ekonomi domestik yang kuat dan daya beli Rakyat yang kuat. Pengusaha akan senang, karena kekuatan daya beli rakyat banyak akan meningkat. Dengan demikian stabilitas sosial serta lingkungan sosial yang ramah akan tercipta, karena kesenjangan sosial dapat dikurangi dan kemiskinan massal berkurang. Secara langsung nantinya ekonomi kerakyatan akan membangun kemandirian bangsa yang lepas dari ketergantungan asing, karena Rakyat yang Cerdas, Kreatif dan Produktif akan menjadi tulang-punggung ekonomi nasional

yang berdaulat (Aswar Aly, <http://partaimerdeka.or.id/artikel/artikel-terpilih/53-mewujudkan-demokrasi-ekonomi-indonesia.html>). Karena hanya bangsa yang mandirilah yang dapat membangun martabat dan kehormatan bangsa. Dengan kemandirian Kita membangun hubungan antar bangsa yang setara dan berkeadilan.

Dalam membangun ekonomi alternative adi sasono mengarah ekonomi pilihan-pilihan alternative, pengembangan ekonomi tidak bisa dipaksakan harus menekuni bidang yang sama, tetapi Negara memiliki kewajiban untuk memberikan gambaran terhadap prospek-prospek peluang usaha yang akan dikembangkan oleh masyarakatnya. Dalam hal ini Adi Sasono menyarankan beberapa hal:

1. *Pembentukan koalisi diantara kelas pekerja disektor modern dan sector informal/tradisional, & sub sector-sector ekonomi rakyat dengan elemen-elemen progresif di dalam masyarakat, termasuk LSM, orang-orang pemerintah dan para peminat, akan merupakan forum yang kuat untuk proses belajar menuju alternative-alternatif pengembangan. Harus diingat bahwa dalam soal ini tidak ada formula yang pasti dan seragam. Pengembangan berpusat pada rakyat hanya bisa didukung sebagai proses belajar terus menerus yang diperan sertai secara penuh kesadaran dan keaktifan oleh rakyat dalam situasi yang sedang berubah*
2. *Selama kondisi-kondisi politik yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi rakyat tidak terdapat dalam struktur politik yang ada, maka politisasi rakyat dalam arti pembangunan kesadaran dalam kaitannya dengan kepunyaan dan dan kemampuan mereka, adalah suatu keniscayaan. Metode-metode riset aksi participatory (PAR: Participatory Action Research) bisa digunakan untuk mencapai tujuan ini*
3. *Pengembangan yang berpusat pada rakyat, yang didasarkan pada manajemen sumberdaya masyarakat yang didesentralisasikan, diusulkan menjadi sebuah alternative baru, karena akan fungsional dalam menghadapi krisis saat ini melalui dua cara; Pertama, manajemen sumberdaya dengan basis komunitas yang terdesentralisasikan akan secara sensitive membukan sumber daya local untuk keperluan spesifik masyarakat setempat. Kedua, pengembangan ekonomi rakyat berdasarkan pengalaman yang sudah, tidak hanya independen dari sumber daya yang dikelola oleh pemerintah (yang menurun pada krisis saat ini), akan tetapi memiliki potensi besar untuk menyediakan investasi penciptaan lapangan kerja berbiaya murah pada suatu saat ketika investasi sector modern adalah berbentuk padat modal dan secara praktis mengalami kemandegan dalam krisis dewasa ini (Adi Sasono, 1987: 23)*

Artinya usaha pengembangan yang berpusat pada rakyat, pada dasarnya adalah sebuah pengembangan politik, dalam arti bahwa kondisi-kondisi sosio-politik harus ditransformasikan agar masyarakat dapat mendefinikan apa yang mereka anggap sebagai masalah dan agar mampu mengembangkan kekuatan kolektif mereka sendiri dalam keadaan tertentu untuk menghadapi problem-problem itu (Adi Sasono, 1987: 23).

Konsep ekonomi kerakyatan yang dikembangkan oleh Adi Sasono sangat dekat dan ada kemiripan dengan gerakan teologi kiri yang coba dikembangkan oleh Munir Mukhan dalam membela kaum mustad'afin—karena keshalehan menurut Mulkhan adalah kepedulian atas kemanusiaan dan pembelaan kepada kaum tertindas. Dalam

teologi kiri pembelaan kaum tertindas (buruh, orang , miskin dan lemah) adalah tugas suci agama sebagai realisasi misi utama islam dalam kehidupan social. Karena itu ritual keagamaan menjadi aksi kemanusiaan yang membela kaum muatad'afin (kaum tertindas) yang diperlakukan tidak adil merupakan ibadah dan dan amal shaleh yang sama pentingnya dengan ibdah lainnya. Iman juga tidak dapat dinilai dari dari pemenuhan rukun iman dan rukun islam, melainkan juga pemihakan praktis pada kepentingan kaum mustad'afin (Abdul Munir Mulkhann, 2002).

Apa yang disampaikan oleh Mulkhann dan Adi Sasono juga seiring dengan gerakan yang dibangun rasulullah dalam berdakwah. Kita dapat melihat bagaimana awal mula dakwah rasul dalam membangun basis masyarakat yang belum paham dengan tauhid, rasulullah membangun basisnya dari bawah dari kelas para budak, buruh, masyarakat miskin dengan menanamkan nilai-nilai persamaan dalam mendapatkan hak-haknya. Gerakan ini terlihat masiv, sehingga posisi rasulullah menjadi posisi yang berbahaya bagi bagi para pengusaha. Yang ditakuti pada awalnya bukan agama tauhid kepada Allah, tapi gerakan ekonomi kerakyatan dimana masyarakat arab diharapkan bisa hidup mandiri tidak dibawah bayang-bayang pengusaha apalagi ditambah dengan ketauhidan yang ditanamkan seiring dengan gerakan tersebut.

Seiring dengan penerapan ekonomi kerakyatan seperti yang cetuskan oleh Adi Sasono, walaupun istilah tersebut telah dikenalkan bung Hatta jauh hari sebelumnya. Kondisi sejahtera (*well-being*) dapat terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Artinya ekonomi kerakyatan tidak boleh bebas nilai. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

Kesejahteraan dapat di wujudkan dengan dukungan dari semua pihak terutama negara, hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 11. Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwasanya pelaksanaan kesejahteraan Sosial harus dilakukan oleh Negara dengan asas: keadilan; kemanfaatan; keterpaduan; kemitraan; keterbukaan; akuntabilitas; partisipasi; profesionalitas; dan keberlanjutan (Undang-Undang RI. No. 11. Tahun 2009. Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 2.: 4-4).

Jika kita mau menganalisa lebih jauh, ada banyak hal yang harus oleh Negara dalam meningkatkan taraf kesejahteraan rakyatnya, Negara tidak cukup hanya menghormati kebebasan rakyatnya dalam beraktivitas dengan tetap menghargai hak orang lain. Namun Negara harus berbuat sesuatu untuk melindungi rakyatnya dari kemiskinan; ketelantaran; kecacatan; keterpencilan; ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (Undang-undang RI. No. 11. Tahun 2009. Tentang Kesejahteraan Sosial) Melindungi artinya bukan menanganangi ketika telah terjadi kemiskinan, ketelantaran, dan sebagainya, pemerintah selayaknya memiliki perencanaan untuk melakukan pencegahan. Jika melihat UU No 11 Th 2009 tersebut pemerintah masih berada dalam perspektif penangananan kemiskinan, ketelantaran dan sebagainya. Dalam pandangan kami perspektif penanganan yang digagas oleh pemerintah melalui UU tersebut tidak akan menjawab penyelesaain sampai akhir dunia ini, oleh karena itu sepantasnya pemerintah berorientasi pada pencegahan terjadinya keterpurukan kesejahteraan social yang selama ini terus melanda.

Tentunya akan sangat berbeda antara orientasi penanganan dan orientasi pencegahan. Penanganan lebih bersifat menunggu bola, artinya tindakan penanganan disesuaikan kasus kemudian barulah bertindak sesuai kebutuhan kasus yang sedang

ditangani, jika kita melihat anomaly yang terjadi selama ini tidak hanya terjadi pada kecolongan pemerintah yang menangani, namun terlihat pada banyaknya kasus yang menimpa rakyat Indonesia dan kemampuan pemerintah yang terbatas.

Namun akan berbeda penanganannya jika pemerintah berorientasi pada pencegahan, karena secara tidak langsung proses pencegahan akan berfungsi sebagai proses penanganan dan pencegahan untuk terjadinya ketimpangan di tengah masyarakat. Dalam melakukan pencegahan Islam telah menggagas beberapa *filantropi* yang menyatu dengan budaya masyarakatnya, seperti Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS), Rumah Yatim, lembaga-lembaga pengajian, yang memiliki khas tersendiri sesuai dengan daerahnya.

Pencegahan tidak bisa terlaksanakan jika tidak dilakukan secara bersama-sama, disamping Filantropi pemerintah juga harus membangun kebijakan-kebijakan yang memihak untuk kebutuhan rakyatnya yang bersifat pencegahan secara permanen, umpamanya; Jaminan Kesehatan, sebagaimana yang tertera dala Konvenan Ekonomi Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi dengan Undang-undang No 11 tahun 2005 tentang Ekonomi Sosial dan Budaya dalam pasal 12;(Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)* Pasal 12), begitu pula dengan jaminan pendidikan; jaminan keamanan, dan lain sebagainya.

Jaminan-jaminan tersebut akan bisa terlaksana dengan baik, jika kebijakan-kebijakan dalam pemerintah berorientasi pada penecegahan terjadinya ketimpangan. Filantropi yang nantinya kita harapkan dapat medorong terjadinya pencegahan permanen akan sangat bersinergi dengan kebijakan pemerintah yang berpihak pada kebutuhan rakyat, khususnya pada bidang ekonomi dengan ekonomi kerakyatan.

Allah juga telah berfirman dalam surat An-Nisa, ayat 9:

وليشحش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ﴿٩﴾

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Qs. An-Nisa: 09)

Allah dengan tegas menyatakan agar kita dapat mempersiapkan generasi yang akan datang dengan jaminan kesejahteraan, apakah itu agama, ekonomi, social, maupun budaya. Landasan ini selayaknya menjadi pemicu gerakan social baik yang dipelopori oleh pemerintah maupun *civil society*.

## Penutup

Ekonomi kerakyatan dalah suatu situasi perekonomian di mana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, hasil-hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat, sementara penyelenggara kegiatan-kegiatan ekonomi itu pun berada dibawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat.

Demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan membuka kran dimana masyarakat dapat berperan dalam mengembangkan ekonomi tanpa harus dibayang bayang-bayangi oleh pengusaha, karena itu peran pemerintah menjadi sangat penting untuk menjelaskan hubungan ke duanya. Karena ekonomi kerakyatan tidak akan membunuh pengusaha, Negara ini membutuhkan pengusaha yang memahami rakyat bukan mengeksploitasi rakyat.

Peran ekonomi kerakyatan akan menjawab ketergantungan bangsa ini dengan bangsa lainnya, dan secara langsung akan membangun hubungan social masyarakat—namun proses penerapannya tidaklah semudah dalam teori. Ketergantungan dan nilai-nilai kapitalis telah tertanam rapi dalam masyarakat Indonesia menjadi tugas berat dalam penerapan ekonomi kerakyatan.

Seharusnya peran agama dapat menjadi andil besar dalam memberikan kesejahteraan yang sebenarnya, baik dari penanaman nilai-nilai maupun praktis pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan. Jika ini belum ada kontribusi dari pelaku agama, maka agama belum berfungsi dalam membentuk kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua pihak.

## Reference

- Edi Suharto, Negara Kesejahteraan dan *Reinventing Depsos*, Makalah disampaikan pada Seminar yang bertema “Mengkaji Ulang Relevansi *Welfare State* dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia” dilaksanakan di Wisma MMUGM, Yogyakarta, 2006
- Sritua Arief & Adi Sasono, Akar Keterpurukan Indonesia, Artikel Terpilih, <http://partaimerdeka.or.id/artikel/artikel-terpilih/52-akar-keterpurukan-indonesia.html>
- Revrison Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Institut of Development and Economic Analysis (IDEA), 1997
- Adi Sasono, *Politik-Ekonomi dan Pengembangan Pedesaan di Jawa*, dalam Buku Dinamika Pesantren ‘Kumpulan Makalah Seminar Internasional’ ‘The Role of Pasantren in Education and Community Development in Indonesia’ Berlin, Republik Federasi Jerman, 9-13 Juli 1987, P3M (Perhimpunan Pengembangan PASantren dan Masyarakat)
- Adi Sasono, *Menegakan Kedaulatan Rakyat dalam Kompetisi Global*, Artikel terpilih, <http://partaimerdeka.or.id/artikel/artikel-terpilih/55-menegakkan-kedaulatan-rakyat-dalam-kompetisi-global.html>
- Aswar Aly, *Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Indonesia (Belajar dari Malaysia, Jepang, dan Korea)*, Arikel terpilih, <http://partaimerdeka.or.id/artikel/artikel-terpilih/53-mewujudkan-demokrasi-ekonomi-indonesia.html>
- Abdul Munir Mul Khan, Teologi Kiri ‘Landasan Gerakan Membela Kaum Mustadl’afin’, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002

**80 ~ Kesejahteraan Dalam Perpektif Islam:  
Analisa Ekonomi Kerakyatan**

Mubyarto, Ekonomi Rakyat Program IDT & Demokrasi Ekonomi Indonesia,  
Yogyakarta: Adita Media, 1997

Joseph MAnurung, dkk, Reorientasi & Reformasi Menuju Ekonomi Kerakyatan,  
Jakarta: IESPED, 1996.